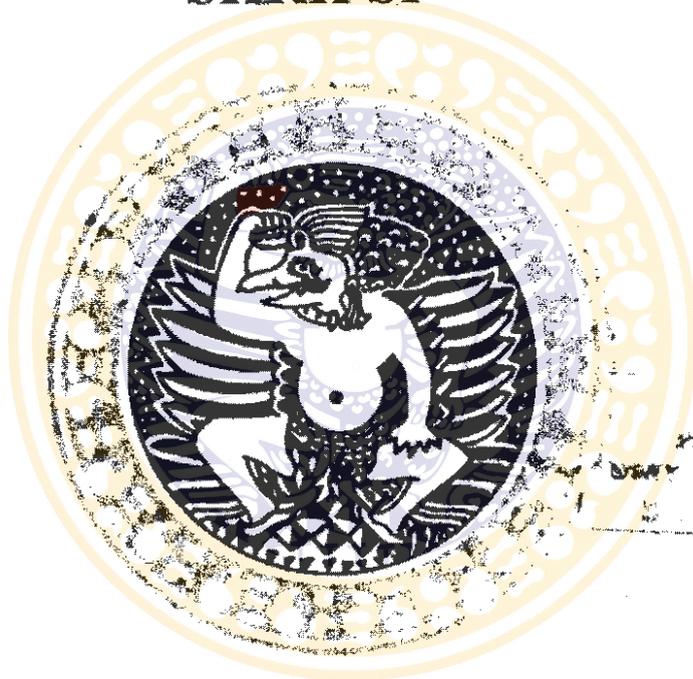


# KEBIJAKSANAAN POLA ANGKUTAN KOTA

[Studi Deskriptif Tentang Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pengukuhan, Karakteristik Birokrasi Pelaksana dan Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pola Angkutan Kota (Bemo/Mikrolet) di Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya]

## SKRIPSI



KK

Fis. AN 109/97

NOV

K

*Disusun Oleh :*

**NOVE TRIMULYA C**

**079213765**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GENAP TAHUN 1996/1997**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji didepan tim penguji pada tanggal 21 Juli 1997 yang terdiri dari:

Ketua Tim Penguji,



Drs. Didit Soepojo, MSc  
NIP: 131 289 507

Anggota,

Anggota,



Drs. Bintoro Wardiyanto, MS  
NIP: 131 801 405



Drs. Eko Supeno  
NIP: 131 871 469

## ABSTRAK

Perkembangan suatu kota membawa pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan suatu kota. Kondisi ini mempengaruhi pula permintaan terhadap sarana dan prasarana perkotaan seperti pelayanan transportasi umum. Penyediaan sarana dan prasara angkutan merupakan hal yang amat penting, tidak saja berkaitan dengan aspek ekonomi tapi juga aspek sosial. Sehingga dapat dikatakan permasalahan angkutan menyinggung langsung kehidupan pribadi warga kota. Sulit dibayangkan apabila jenis angkutan ini mengalami kemacetan atau tidak bisa beroperasi, mobilitas masyarakat kota akan terganggu dan masyarakat akan mengalami kerugian besar, bukan saja biaya ekonomi (*economic cost*) tapi juga biaya sosial (*social cost*) yang harus dibayar.

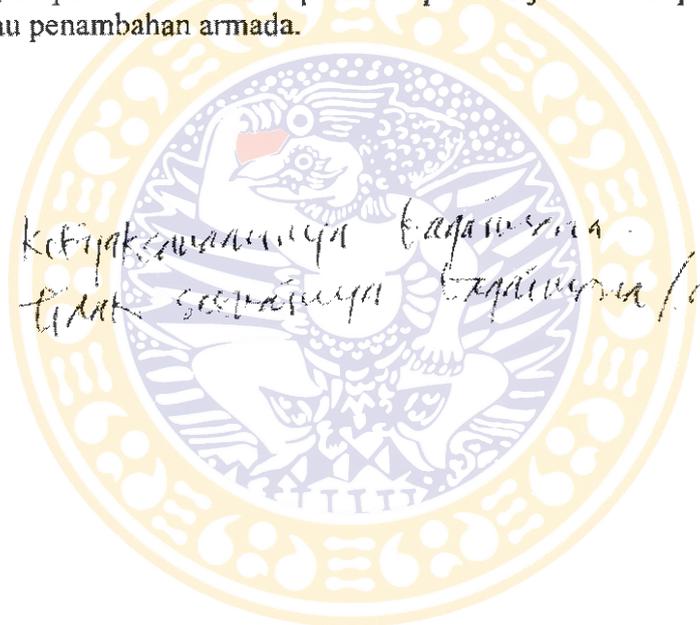
Perhatian Pemda KMS terhadap permasalahan angkutan kota ditunjukkan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan/kebijaksanaan untuk menata angkutan kota. Salah satu kebijaksanaan yang dibuat adalah Surat Keputusan Walikota KMS No. 249/1991 tentang Penetapan pembukaan jalur trayek (lyn) baru, perpanjangan jalur trayek dan penambahan jumlah kendaraan angkutan penumpang umum di Wilayah KMS yang didalamnya juga mengatur tentang pola operasional angkutan kota yang berdasarkan zone (pendaerahan).

Penelitian dengan metode deskripsi yang menggunakan analisa kualitatif ini mencoba untuk menjawab pertanyaan; bagaimanakah komunikasi antar organisasi dan kegiatan pengukuhan, karakteristik birokrasi pelaksana, dan sikap pelaksana dalam implementasi kebijaksanaan pola angkutan kota di Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya?

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah beberapa pejabat/staf yang mewakili masing-masing instansi yang duduk dalam keanggotaan BPTD sebagaimana ditetapkan dalam SK Walikota No. 188.45/197/402.1.04/1996 tentang Pembentukan Badan Pembina Transportasi Daerah Kotamadya Surabaya. Teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive*, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumenter. Untuk mendapatkan keabsahan data digunakan teknik *triangulasi* sumber sebagai upaya *check* dan *recheck* terhadap berbagai informasi yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijaksanaan pola angkutan kota gagal dilaksanakan, karena apa yang ada dilapangan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan/kebijaksanaan. Kegagalan ini diindikasikan dengan; lemahnya komunikasi antar organisasi dan kegiatan pengukuhan, lemahnya karakteristik birokrasi, dan lemahnya sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

Penelitian ini juga memotret kekuatan berbagai pihak yang terlibat baik pemerintah, pengusaha angkutan, pemilik dan supir angkutan, serta masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kota. Dapat dikatakan bahwa pengusaha angkutan (dealer) mempunyai *bargaining power* dan *bargaining position* yang kuat karena mereka memiliki sumber daya yang sulit untuk disediakan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah cenderung berorientasi pada keuntungan sehingga lebih respek terhadap kegiatan-kegiatan pengusaha dibanding memperhatikan distribusi angkutan yang merata bagi semua masyarakat kota. Disisi lain masyarakat kota tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap kebijaksanaan, paling hanya sesekali melakukan tawar-menawar harga dengan awak angkutan. Dan akhirnya awak angkutan sebagai kelompok sasaran memiliki cukup kekuatan untuk mempengaruhi kebijaksanaan, hal ini ditandai dengan penolakan terhadap beberapa kebijaksanaan penambahan trayek baru atau penambahan armada.

- 
- kebijaksamaannya bagai mana.
  - tidak sesamanya bagai mana / di mana